

# Keterpurukan Petani Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

Yogyakarta, [pamartanusantara.co.id](http://pamartanusantara.co.id)-Di penghujung tahun 90-an ketika terjadi krisis moneter berkepanjangan, masyarakat Labuhanbatu (sebelum pemekaran) hampir dapat dikatakan tidak merasakan kesulitan ekonomi yang berarti. Hal tersebut terjadi bukan karena suksesnya program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Pemerintah, melainkan karena harga getah karet yang merupakan mata pencaharian utama melambung tinggi. Tentu saja hal ini dapat dimaklumi, getah karet sebagai komoditi ekspor sangat bergantung dengan nilai tukar rupiah, jika rupiah melemah dan dolar menguat maka itu dipahami masyarakat sebagai sebuah berkah karena akan berimbas pada membaiknya harga getah karet alam.

Namun, beberapa tahun kemudian yakni di awal-awal tahun 2000-an dominasi karet mulai diimbangi dengan kehadiran kelapa sawit sebagai komoditi yang menjanjikan. Tergiuir dengan keberhasilan kelapa sawit, tak sedikit petani kemudian mengganti tanamannya, bahkan tanaman karet muda yang kondisinya sangat baikpun rela ditebang demi tuah kelapa sawit. Hal ini berlanjut cukup lama, orang-orang yang tidak mengganti karetnya dengan kelapa sawit umumnya karena kondisi landscape tanah yang sulit untuk ditanam dengan bibit kelapa sawit.

Satu dekade kemudian (sekitar 2010-an), harga karet kembali menggeliat, petani karet kembali tersenyum dengan harga getah karet yang menjanjikan. Banyak petani kemudian melakukan ekspansi dengan menanam lahan-lahan tidur atau semak belukar yang kontur tanahnya sulit ditanami dengan dengan kelapa sawit. Menariknya, walaupun harga karet saat itu menjanjikan tetapi petani yang terlanjur menanam lahannya dengan kelapa sawit tidak lantas mengganti komoditinya. Dapat dimaklumi, sebab harga kelapa sawit saat itu tidak benar-benar terpuruk, kelapa sawit masih dapat bersaing dengan karet dan memang modal untuk mengkonversi kepada kepala sawit cukup besar. Selain itu, pengalaman dari pergantian komoditi dari karet ke kelapa sawit yang memperlihatkan bahwa sebagian petani juga telah menyesali proses konversi karet tersebut, sehingga tidak ingin kapok 2 kali.

Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, kini petani karet seolah tidak memiliki harapan lagi, sejak tahun 2013 petani karet di Labuhanbatu Raya mengalami titik nadir. Bagaimana tidak, sudah hampir 5 tahun petani karet tidak merasakan lagi bau getah karet dengan wanginya rupiah. Harga getah karet terus mengalami fluktuasi yang tidak menguntungkan petani, bahkan terjun bebas, sehingga tidak sedikit petani karet yang memilih untuk tidak menyadap saja, karena dianggap lebih menguntungkan dibanding harus menyadap tetapi rugi, belum lagi jika harus berbagi (petani bagi hasil).

Begitu pula halnya dengan kelapa sawit, walaupun harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masih cukup baik, namun produktivitas buah kelapa sawit tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Badai elnino yang menyebabkan kemarau panjang pada tahun 2015 lalu memberi pengaruh buruk pada produktivitas kelapa sawit pertanian rakyat. Sehingga jika dahulu para petani karet diberi pilihan untuk

mengkonversikan komoditinya, kini sepertinya petani akan benar-benar sulit untuk mengganti karet-karetnya dengan kelapa sawit kecuali untuk tanaman pada lahan baru atau pada karet-karet tua.

Jika tidak ada gebrakan dari para stakeholders, kondisi ini akan terus dialami oleh para petani, di satu sisi terkoneksi komoditas petani dengan pasar global membuat para petani dalam posisi rentan. Bagaimana tidak, para petani tidak punya kuasa atas harga komoditinya, begitu pula fluktuasi ekonomi global tentu akan selalau menghantui komoditi yang berorientasi pasar. Sementara itu, berharap pada pemerintah juga sepertinya cukup sulit, karena walaupun kita termasuk produsen yang diperhitungkan dalam hal jumlah, namun negara kita bukanlah negara yang mampu menentukan harga atas komoditas getah karet alam dan juga CPO sebagai turunan kelapa sawit.

Dapat kita bayangkan 5 tahun sudah kerentanan ini berlangsung tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang nyata bagi perbaikan ekonomi para petani perkebunan khususnya karet. Padahal harapan besar itu ada ketika terjadi suksesi kepemimpinan nasional, pemerintahan baru sangat diharapkan mampu memperbaiki keterpurukan yang dialami petani karet, nyatanya hampir 3 tahun berlalu kondisi petani karet masih belum membaik.

Jika pemerintah pusat sepertinya juga tidak memperlihatkan keberpihakannya pada petani karet, bagaimana dengan pemerintahan di aras lokal? Yakni Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu, Labusel, Labura bahkan Palas dan Paluta, walaupun pemerintah daerah tidak mampu memberi solusi terkait dengan harga getah karet, karena sangat terkait dengan mekanisme pasar global.

Pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan langkah-langkah taktis seperti mendorong petani untuk melakukan diversifikasi komoditi pertanian. Baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dilakukan para petani kakao di Sulawesi Selatan, yang sementara mengganti tanamannya kepada nilam maupun palawija sambil menanti tanaman kakao membaik.

Untuk jangka panjang misalnya, pemerintah daerah mendorong pada petani untuk tidak hanya sebatas menanam karet atau kelapa sawit, tetapi petani dapat menggantikannya dengan kakao, kopi, kelapa maupun kayu-kayuan. Sedangkan untuk jangka pendek, pemerintah bisa saja mendorong petani untuk menanam pisang, palawija, sayuran maupun nilam, atau bisa juga pemerintah mendorong sektor-sektor peternakan dan juga perikanan sebagai pilihan-pilihan pemasukan ekonomi rakyat. Tak sulit rasanya bagi pemerintah daerah menggelontorkan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Setelah diversifikasi pertanian, pemerintah dan pelaku usaha pertanian dan perkebunan juga diharapkan mampu mendorong input teknologi secara optimal pada sektor pertanian kita. Sehingga dengan teknologi yang maju produktivitas pertanian kita tentu akan lebih maksimal yang tentu berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup petani kita.

Di samping diversifikasi komoditas pertanian dan input teknologi pertanian, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah juga diharapkan mendorong industri-industri hilir di sektor pertanian. Sehingga selain menambah lowongan kerja baru di tengah tingginya tingkat pengangguran, ada banyak manfaat ekonomi yang dapat

kita petik. Industrialisasi produk pertanian tentu akan memberi nilai lebih pada komoditas ekspor kita, kita tidak lagi mengekspor barang jadi atau setengah jadi kemudian mengimpornya setelah menjadi barang jadi tetapi sudah dapat mandiri dari hulu hingga hilir.